



MUSLIM MINORITAS DAN WACANA GENDER DI AUSTRALIA

Munjin^{*)}

^{*) Penulis adalah Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.), dosen tetap Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.}

Abstract: *In the context of nation-state, a group of society who embrace Islam can be called as a minority, for they are little in number. They sometimes meet some unintended problems like politically marginalized, difficult to integrate, backward education, economy, a place for praying, permitted food and so on. The problem usually come from prejudice feeling or negative thinking from in the majority. But, the condition does not happen in Australia, even women are free to choose their profession. Interestingly, women have a better destiny than men. There are actually, many factors that cause the minority, i.g.; refugees, guestworkers, exiled, migrant, conversion and ethnic religion cleansing. **Keywords:** Minority, unintended problem, women.*

A. PENDAHULUAN

Wacana minoritas sebenarnya telah lama muncul seiring perjalanan sejarah perkembangan Islam. Ada perdebatan tentang bagaimana mendefinisikan *dar al-Islam* dalam hubungannya dengan *dar al-harb*, kawasan di mana Islam tidak dominan dan bukan menjadi landasan bagi pemerintah komunitas tersebut maupun strukturnya.

Sehubungan dengan itu, ternyata para pemikir muslim telah berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan merekomendasikan apa saja yang perlu dilakukan kepada para muslim yang tinggal di negara nonmuslim. Sebagai salah satu hasilnya adalah mereka berusaha untuk meredefinisi ulang tentang pengertian *dar al-Islam*.

Menurut Abu Hasan al-Asyari, ada enam konsepsi yang berbeda mengenai konsep *dar al-Islam*. Ulama lain mengatakan bahwa *dar al-Islam* merupakan tempat diterapkannya syari'ah dengan tepat, sedangkan lainnya membatasi bahwa *dar al-Islam* adalah tempat berkuasanya seorang penguasa muslim, dan pendapat lainnya dengan syarat harus adil dan shaleh. Sementara itu, Hanafi dan Syafi'i lebih luwes lagi dalam memberi batasan, yakni suatu daerah yang dikuasai dan dikendalikan oleh nonmuslim, akan tetapi menjadi bagian dari kawasan Islam.¹ Perintah secara tegas dikemukakan oleh golongan Syi'ah dan Suni agar minoritas hijrah ke negeri lainnya jika dalam pemerintahan tadi terjadi banyak kemaksiatan dan korupsi. Pendapat ini berlangsung cukup lama dan pernah digunakan sebagai doktrin terhadap pemerintahan muslim pribumi melawan kekuasaan kolonial.²

Dalam konteks negara bangsa (*nation state*) yang dibangun secara kolektif dewasa ini, mungkinkah pendapat-pendapat tadi relevan diterapkan? Padahal setiap negara mempunyai kedaulatan sendiri dan selalu tunduk pada aturan main hukum internasional. Mungkinkah suatu negara dapat menerima gelombang pengungsian (baca: *muhajirin*) untuk tinggal, seperti negeri Abysinia ketika menerima hijrahnya Rasul atau diubah menjadi hijrah internal?³ Atau bahkan melakukan perlawanan untuk merdeka, seperti bangsa Moro di Philipina, atau mungkin justru melakukan kerjasama dengan pemerintah (nonmuslim) sehingga eksistensinya diperhitungkan dan diakui sama dengan yang mayoritas, sehingga tidak ada istilah *kita* dan *mereka*, antara *kami* dan *anda*?⁴



Dalam kaitan itulah penulis bermaksud untuk mendiskusikan tentang bagaimana asal-usul terjadinya minoritas, bagaimana seharusnya minoritas bernegara di pemerintahan nonmuslim, dan bagaimana wacana gender yang berkembang di Australia.

B. LAHIRNYA KAUM MINORITAS

Perlu diketahui bahwa Islam sendiri pada awal kemunculannya adalah sebuah minoritas yang berada di tengah mayoritas kaum kafir Quraisy. Dalam perjalanannya sebagai agama baru para pengikutnya tidak terlepas dari adanya intimidasi, teror, siksaan, ancaman pembunuhan, atau bahkan pengusiran dari tanah kelahirannya sendiri.

Sebagai kaum minoritas yang tidak mungkin bisa bertahan lagi, keputusan yang diambil oleh Rasulullah adalah dengan melakukan hijrah. Hijrahnya Rasul ini mau tidak mau ada muatan politisnya, yaitu dengan meninggalkan tanah kelahirannya, kemudian menyusun kekuatan dari luar, dan setelah itu mereka akan kembali lagi dengan tujuan untuk merebut kembali negeri mereka. Itulah salah satu contoh bagaimana metode minoritas menghadapi mayoritas.

Dalam perkembangannya, istilah minoritas bila dikaitkan dengan negara bangsa, yakni umat Islam yang jumlahnya sedikit dan tinggal di negara nonmuslim, mereka mengalami berbagai masalah yang tidak diharapkan, seperti termarginalisasi secara politik, ekonomi, sosial dan budaya, padahal mereka merasa ikut membentuk negara tersebut. Sebagai contohnya adalah minoritas muslim yang ada di beberapa Negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura.⁵

Di samping itu, ada faktor lainnya yang menyebabkan munculnya minoritas muslim yakni terjadinya migrasi kewarganegaraan dari negara-negara muslim ke negara nonmuslim, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Selain migrasi, konversi agama juga menjadi faktor munculnya minoritas muslim, seperti masyarakat Black Muslim di Amerika Serikat dan Korea dibawah komando Haji Sabri Su Jung-Kil. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut sebagai *ethnic religious cleansing*, seperti yang terjadi di Spanyol. Setelah ditundukkan oleh kaum Kristen, kaum Muslim dipecah sesuai dengan ras masing-masing dan senantiasa mendapat represi dari mayoritas.

Nasib minoritas di beberapa negara memang sangat mengenaskan, seperti halnya yang terjadi di Negara Semenanjung Balkan dan Chechnya. Namun berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh kaum minoritas muslim di Negara Korea, mereka diakui eksistensinya, mendapatkan fasilitas dari negara, hak-hak sipilnya dihormati dan lain-lain. Nah dalam konteks ini, bagaimana seharusnya minoritas muslim menjalani hidup di negara nonmuslim?

Suatu umat bisa dikatakan sebagai kelompok minoritas apabila jumlah pengikutnya lebih sedikit atau sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pengikut lainnya (mayoritas).

C. MUSLIM SEBAGAI TAMU DI NEGERI ORANG

Di kalangan minoritas muslim, perlu dikembangkan adanya kesadaran di benak mereka bahwa keberadaan mereka di negeri yang mereka tempati meskipun terkadang mereka tidak ikut berjuang dalam mendirikan negeri tersebut, mereka juga merupakan bagian dari negeri tersebut dan oleh karenanya mereka harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Asalkan peraturan tersebut tidak menyentuh pada wilayah keyakinan atau adanya upaya untuk membatasi kebebasan mereka untuk mengekspresikan keyakinan mereka tersebut.



Kesadaran tersebut sangat penting, karena akan mempengaruhi tindakan apa yang semestinya diambil ketika harus berinteraksi dengan kaum yang mayoritas. Mengingat begitu berat misi yang harus dipikul oleh minoritas, maka memerlukan satu strategi jitu untuk bisa tetap *survive*, dan jika perlu mengembangkan agamanya. Misi pokok yang diemban oleh minoritas biasanya berkisar pada isu-isu tentang identitas, kawin silang, relasi gender, ibadah, pendidikan, serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.⁶

Salah satu strategi yang mungkin dilakukan adalah dengan membangun kepercayaan terhadap mayoritas, bahwa Islam adalah agama damai dan anti kekerasan. Hal inilah yang paling berat, sebab tindakan-tindakan yang dilakukan oleh militan fundamentalis Islam memunculkan stigma di masyarakat internasional bahwa Islam adalah agama kekerasan dan identik dengan teroris. Oleh karena itu, di Inggris muncul istilah baru *Islamophobia*, yaitu "*unfounded hostility towards Islam*" dan tindakan diskriminatif baik terhadap individu maupun komunitas muslim dan berusaha untuk mengeluarkannya dari mainstream sosial politik.⁷ Fenomena ini diperparah lagi dengan adanya fatwa Syi'ah yang mewajibkan hukuman mati terhadap Salman Rusydi.

Tantangan berat yang dialami oleh minoritas muslim di Inggris itu dihadapi dengan kepala dingin dan dengan cara sedikit demi sedikit membangun *social trust*. Mereka menyadari bahwa minoritas di Inggris memiliki *social capital* yang besar, yakni 44% dari penduduk yang berasal dari Asia adalah muslim, serta telah ada 849 masjid dan 950 organisasi muslim lokal. Untuk membangun *social trust* dan mengakomodasi organisasi yang banyak itu, mereka membentuk organisasi yang disebut dengan *Muslim Council in Britain (MCB)*⁸ pada tahun 1997, sebuah organisasi yang memayungi seluruh organisasi muslim lokal.

Advokasi yang dilakukan oleh MCB adalah membangun kesepahaman dan kerjasama dalam komunitas muslim, mengatasi ketertinggalan dan diskriminasi yang dialami oleh kaum muslim, menyokong apresiasi terhadap budaya muslim, dan menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan seluruh masyarakat. Di samping itu, mereka juga melakukan lobi kepada menteri dalam negeri, polisi, editor koran dan jurnal, mengadakan penerbitan regular, serta membuka *website*.

Di samping itu, ada upaya untuk senantiasa mencatat dan menyebarkan perlakuan yang tak adil terhadap kaum muslim. Perlakuan itu meliputi *religious prejudice*, *religious hatred*, *religious disadvantages*, *direct religious discrimination*, dan *indirect religious discrimination*.

Perjuangan damai juga dilakukan melalui jalur politik, yakni membentuk Partai Politik Islam Inggris. Oleh karena kurang mendapat dukungan, partai ini kemudian bergabung dengan Partai Buruh yang lebih konsern terhadap kaum muslimin. Hasilnya, pada tahun 1981, tiga di antara 90 anggota dewan Bradford berasal dari kaum muslim, dan yang paling menarik adalah pada tahun 1994 ada seorang perempuan muslimah yang terpilih sebagai mayor.⁹ Pada tahun 1997, Muhammad Sarwar terpilih sebagai anggota parlemen mewakili Glasgow Govan dan sepeninggal beliau, Partai Buruh memilih tiga orang muslim untuk duduk sebagai anggota DPR yaitu Lord Ahmed, Baronnes Udin, dan Lord Aly. Puncak dari semua itu adalah pidato Perdana Menteri pada acara ulang tahun Gedung Serbaguna untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri pada bulan Februari 1998.

Sejak itu, minoritas muslim di Inggris semakin diperhitungkan eksistensinya. Kiprah di dunia politik juga semakin meluas, karena ada salah satu umat muslim yang menjadi anggota Parlemen Eropa dari Partai Konservatif. Di wilayah media massa, apresiasi terhadap kaum muslim ditunjukkan dengan adanya rubrik Islam selama bulan Ramadhan, jadwal imsakiah yang dibuat oleh Dewan Muslim Inggris dan dimuat di Koran *Times* dan *Guardian*, siaran radio Ramadhan dan tayangan khusus oleh BBC

London. Dalam bidang pers, kaum muslim berhasil menerbitkan koran bulanan *Q-News* dan *Muslim News*. Di bidang pendidikan, minimal ada 60 sekolah muslim, dan pada tahun 1997 sekolah-sekolah tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah Inggris, yang selama dekade 1980-an dan 1990-an selalu ditolak oleh Pemerintahan Konservatif.¹⁰

Di bidang *muamalah*, kaum muslim mempunyai kemerdekaan untuk mengekspresikan ritualnya seperti memakai kerudung, menyembelih hewan qurban, mengumandangkan adzan, shalat di masjid, shalat Ied di lapangan terbuka, dan yang paling penting adalah dihilangkannya istilah ekstrimis dan teroris dari kaum minoritas muslim.¹¹

Keberhasilan minoritas muslim (sebagai emigran) di Inggris untuk duduk berdampingan dengan mayoritas adalah sebuah gambaran bahwa perlakuan diskriminatif yang dialami tidak harus dihadapi dengan kekerasan, melainkan dengan bersikap sopan dan positif di negeri orang sambil menunjukkan bahwa apa yang selama ini dipersepsi oleh mayoritas adalah tidak benar adanya. Harmoni yang sekarang diperoleh di Inggris, apakah juga terjadi di Australia?

D. DESKRIPSI MINORITAS MUSLIM DI AUSTRALIA

Jika kedatangan orang-orang Islam di Inggris baru sekitar tahun 1950, lain halnya dengan kaum muslim yang datang ke Australia. Mereka berasal dari Afgan dan pertama kali datang sebagai pekerja transportasi unta pada tahun 1840 di Adelaide. Pada puncaknya ada sekitar 3000 pekerja muslim Afgan yang bekerja sebagai pengawal unta. Mereka datang tanpa keluarganya, dengan harapan bisa pulang kembali ke negeri asalnya. Akan tetapi, mereka tidak dapat pulang kembali dan akhirnya menetap di Australia. Kehidupan mereka mengalami marginalisasi dan dipenuhi dengan kecurigaan, baik secara ekonomi, agama, maupun sosial. Akibatnya, mereka terpaksa menikah dengan wanita malang seperti suku Aborigin atau istri yang ditinggal oleh suaminya.

Kondisi tersebut berlangsung sampai dengan tahun 1970 ketika terjadi abolisi oleh pemerintahan Whitlam, dan mulai saat itu pula emigran yang berasal dari negara Timur Tengah mulai berdatangan kembali. Kemudian pada tahun 1976 telah berhasil dibangun masjid Imam Ali di Lakemba serta masjid al-Zahra di Arncliffe pada tahun 1983. Dua masjid ini dibangun oleh kaum Syi'ah yang sebelumnya telah membentuk organisasi *Lebanese Muslim Association*.

Emigran dari Indonesia sebenarnya berdatangan ke Australia mulai tahun 1901 sebagai pekerja perkebunan, namun baru pada era tahun 1960-an banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa ke Australia. Mereka yang menetap di sana kemudian membentuk organisasi *Indonesian Muslim Community*. Pengiriman mahasiswa Indonesia ke Australia oleh orang-orang kaya meningkat tajam pada tahun 1990.

Perjalanan hidup dan perlakuan yang dialami oleh minoritas muslim di Australia memang tidak seperti yang dialami oleh kaum minoritas di Inggris. Hal ini mungkin disebabkan karena begitu banyaknya etnik muslim yang berdiam di Australia, di samping juga adanya peran para imam masjid dalam memahami Islam.

Dalam memahami Islam, mereka sangat fleksibel. Ajaran Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu lapis pertama yang disebut sebagai *core value*, lapis kedua sebagai *interpretation area*, dan lapis ketiga sebagai *cultural manifestation*.¹² Wilayah yang masuk dalam *core value* atau tanpa interpretasi (keimanan, nilai-nilai universal, dan syari'ah) semisal setiap muslim wajib melaksanakan shalat, semua sepakat dan tanpa *reserve*. Adapun yang masuk dalam wilayah kedua adalah interpretasi, yaitu bagaimana cara melaksanakan shalat. Sebagian orang sepakat dengan satu cara tertentu, sedangkan sebagian lainnya



tidak. Yang masuk dalam wilayah ketiga adalah manifestasi dari nilai inti, dan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiogeografi, misalnya model pakaian yang dipakai untuk shalat. Muslim Australia sepakat bulat pada ajaran lapis pertama, dan bisa jadi sangat berbeda jauh pada ajaran lapis ketiga.

Pemahaman ajaran yang demikian luwes ini mengakibatkan hubungan internal minoritas muslim saling menghargai perbedaan, mereka sepakat dalam ketidaksepahaman dalam penafsiran, sehingga tidak ada konflik antarminoritas, meski mereka berasal dari etnik dan aliran yang berbeda. Dalam hubungan eksternal dengan kaum mayoritas, mereka membedakan mana isu-isu yang bisa diperdebatkan, misalnya mungkin-tidaknya berkompromi dengan budaya dan nilai-nilai Barat, sesuaikan deklarasi *Human Right* dengan ajaran Islam, bagaimana peran dan emansipasi perempuan dalam Islam, bagaimana konsep bunga bank, serta isu yang tidak relevan seperti pendirian Negara Islam. Mereka menyadari bahwa, *pertama*, kaum muslim adalah kaum yang minoritas, dan *kedua*, pemerintah Australia memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kaum muslimin untuk beribadah tanpa adanya intimidasi, artinya mereka dapat menjadi muslim sejati tanpa harus membentuk Negara Islam.

Pengaruh lain dari pemilahan ajaran Islam tersebut adalah reinterpretasi terhadap ajaran Islam klasik, sebagai contoh, hukuman potong tangan bagi pencuri dan hukuman mati bagi seorang pembunuh. Mereka menyadari semangat ajaran itu bukan pada pelaksanaan hukumannya, tetapi justru bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi pencurian dan pembunuhan.¹³

Kemudian tentang riba atau bunga bank, ada beberapa pilihan. Apabila memungkinkan, disarankan untuk menghindari bank konvensional. Jika tidak bisa, maka bunga bank tersebut dapat diberikan kepada lembaga sosial, dan apabila dalam keadaan darurat diperbolehkan semisal pinjaman perumahan. Dalam kaitannya dengan perbankan ini dan untuk menghindari riba, lembaga keuangan muslim dan koperasi masyarakat muslim bekerjasama dengan pemerintah mendirikan bank tanpa bunga.

Kasus lainnya adalah masalah perceraian, di satu sisi hukum positif Australia tidak mengenal hukum Islam, namun di sisi lainnya hukum Islam tidak mensyaratkan orang yang ingin bercerai untuk pisah ranjang selama periode tertentu. Muslim berkeinginan untuk menggabungkan keduanya, hukum negara dengan hukum Islam. Dalam praktiknya mula-mula ditemui beberapa kendala, namun setelah berjalan beberapa waktu kendala tersebut dapat diatasi dengan baik dan bijaksana.

Keharmonisan antara kaum minoritas muslim dengan kaum mayoritas bisa dilihat dari keikutsertaan mereka pada pemilu (walaupun yang dipilih adalah nonmuslim), hidup berdampingan dengan nonmuslim, berbelanja di toko nonmuslim, bekerja di perusahaan nonmuslim, mempekerjakan warga nonmuslim pada usaha yang dipunyai oleh warga muslim, serta menjalani kehidupan sebagaimana yang lazim dilakukan oleh kaum mayoritas.

Muslim Australia tidak pernah melakukan demonstrasi dan melakukan *sweeping* terhadap perjudian, prostitusi, diskotik, kaum gay/lesbi, toko minuman keras, bar, panti pijat, *nite club* dan kemaksiatan lainnya, meskipun mereka tidak setuju. Alasannya, mereka sadar betul bahwa negeri Australia adalah negara plural, baik agama, ras, suku bangsa, tradisi, sistem kepercayaan, yang berbeda-beda dalam menyikapi isu tersebut. Di samping itu, mereka mempunyai hak dan kebebasan untuk melakukan tindakan dan perbuatan sesuai dengan pandangan hidup mereka. Kaum minoritas muslim Australia mempunyai sesanti "*live and let live*",¹⁴ dan bukan tugas mereka untuk mengubah masyarakat Australia.

Muslim Australia menganggap sebagai sebuah mimpi untuk mengislamkan dunia, sebab umat Kristen-pun juga berkeinginan untuk mengkristenkan dunia dengan *Kingdom of God*, sedangkan yang beragama Hindu juga punya misi yang sama untuk menghindukan dunia. Dalam hal ini, semua agama mempunyai impian yang sama.



Sikap kooperatif kaum muslim Australia berimplikasi terhadap akses mereka pada layanan publik, terbukti dengan adanya sekitar 27% dari kaum muslim Australia yang merupakan pekerja profesional seperti manager, administrator, dan teknisi, sedangkan yang 73% adalah pekerja, pedagang kecil, sopir, dan buruh. Adapun perempuan yang mempunyai profesi hanya sepertiganya. Salah satu hal yang menjadi sebab banyaknya pengangguran muslim Australia adalah karena mereka tidak mempunyai keahlian dan tidak mahir berbahasa Inggris.

Di bidang pendidikan, sebagian besar pembangunan sekolah disponsori oleh donatur dari luar negeri, namun kelanjutannya disokong sepenuhnya oleh pemerintah Australia. Salah satu perguruan tinggi Islam yang terkenal adalah *King Khalid Islamic College (KKIC)* yang didirikan tahun 1983 di Melbourne, kemudian disusul di Victoria, New South Wales, Queensland, dan Australia Utara.

Sekolah-sekolah muslim tersebut menggunakan kurikulum lokal dan selalu dimonitor oleh Departemen Pendidikan. Jadi, apabila ada stereotip dan kritikan tentang sekolah muslim, hal itu semata dikarenakan masih ada pihak yang kurang senang dengan kemajuan Islam.

Memang banyak kendala dalam proses pembelajaran terutama dari guru yang berasal dari luar sehingga tidak tahu banyak tentang budaya Australia, dan banyaknya guru yang nonmuslim mengakibatkan kurang seimbangannya ranah yang dikembangkan. Di samping itu, masih banyak sekolah muslim yang masih tertinggal.

Perjuangan untuk memajukan muslim memang masih panjang, dari membentuk organisasi AFIS (*Australian Federation of Islamic Societies*) sebagai payung organisasi nasional pada tahun 1960 yang didirikan oleh Fahmi al-Islami, Abdul Khaliq Kazi, dan Ibrahim Dallal, dan disusul dengan *Australian Federation of Islamic Council (AFIC)* pada tahun 1976 yang salah satu proyeknya adalah pembuatan sertifikat halal.

E. WACANA GENDER

Sebagaimana di belahan dunia muslim lainnya, kaum minoritas muslim di Australia dalam masalah yang berhubungan dengan bagaimana perlakuan laki-laki dan perempuan, relatif masih ada persoalan. Persoalan yang muncul berkisar pada masalah dunia kerja, partisipasi politik, dan pendidikan. Namun demikian, persoalan tersebut muncul lebih dikarenakan faktor budaya lokal dan bukan berasal dari ajaran Islam.¹⁵ Di beberapa negara, posisi laki-laki dan perempuan sudah sejajar, akan tetapi di negara lainnya nasib mereka masih sangat memprihatinkan, semisal di Afganistan untuk pungutan suara saja kaum perempuan tidak diberikan hak untuk memilih.

Di negara Australia, ada tiga aliran yang selalu mendebatkan wacana gender, mereka adalah kaum tradisional, kaum liberal, dan kaum neomodernis.¹⁶ Kaum tradisional adalah sekelompok kecil perempuan, termasuk beberapa yang berasal dari Eropa, yang sangat vokal menyuarakan bahwa peran perempuan harus dibatasi dan hanya mengurus anak dan suami. Mereka membatasi pergaulan di tempat yang memungkinkan laki-laki dan perempuan bisa berbaur dan bercampur. Mereka mengkritik habis-habisan perempuan yang tidak mengenakan jilbab.

Adapun kaum liberalis adalah kelompok yang menentang pandangan tradisional yang dianggap sebagai hal yang kuno dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Apa yang mereka inginkan adalah pandangan baru tentang isu perempuan dan memerangi ketidakseimbangan serta menolak simbol-simbol dominasi *patriarchal*. Jilbab bagi mereka hanyalah simbol penindasan dan mereka tidak

menginginkan hal-hal yang artifisial. Kaum liberalis ini tidak melaksanakan shalat di masjid dikarenakan *shaf* mereka yang harus berada di belakang laki-laki dianggap sebagai dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan.

Pendapat yang bersifat konstruktif adalah apa yang disuarakan oleh kaum neomodernis. Kelompok ini menyatakan bahwa secara historis telah ada kesalahan penafsiran terhadap peran perempuan. Anggota kelompok ini terdiri atas kaum muda yang tumbuh di Australia, pemeluk baru, dan perempuan yang punya pemikiran agak liberal. Mereka berpendapat bahwa semua peran publik dapat dipegang oleh perempuan semisal bidang pendidikan, politik, ekonomi dan pengambilan keputusan dan mereka juga menolak anggapan bahwa perempuan bersifat komplementatif bagi laki-laki.

Menurut Abdullah Saeed,¹⁷ beberapa isu gender yang mencuat adalah sebagai berikut.

1. Poligami

Isu yang paling menyedot perhatian luas dewasa ini adalah masalah poligami. Ada beberapa negara yang membolehkan, ada yang melarang keras, ada juga yang membolehkan dengan beberapa syarat, misalnya harus ada persetujuan dari istri dan pihak pengadilan. Adapun di Australia, poligami dianggap sebagai hal yang ilegal.

Namun bagi kaum tradisionalis, poligami tetap diperbolehkan dan tidak bisa diubah menjadi dilarang hanya karena perubahan sikap dan nilai. Hal yang menarik adalah sebagian besar penolakan mereka lebih dikarenakan masalah pribadi daripada berlatar belakang agama.

Bagi kaum modernis, persoalan dibolehkannya poligami pada awal Islam itu sangat berkaitan dengan kondisi dan atmosfer tertentu. Apabila itu diterapkan pada abad duapuluh satu, sudah tidak tepat lagi meskipun diterapkan di negara yang sangat demokratis seperti Australia. Pada saat yang sama, hukum positif di Australia memang melarang seorang laki-laki berpoligami. Alasannya, seorang laki-laki tidak mungkin memberikan hak yang sama kepada istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁸ Oleh Karenanya, kaum muslim Australia generasi kedua dan ketiga sangat menolak adanya poligami, dan yang ada dalam otak mereka adalah isu monogami.

2. Hubungan laki-laki dan perempuan

Isu kontroversial yang masih sering muncul di kalangan pegiat gender di Australia adalah pemisahan antara laki-laki dengan perempuan di ranah publik. Kaum tradisionalis masih menyatakan bahwa hak-hak perempuan harus dibatasi, dan perempuan harus memakai penutup muka sehingga mereka tidak dapat dikenali.¹⁹

Adapun kaum modernis menyatakan bahwa pemisah itu tidak Islami, karena sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah pun perempuan sudah berbaur dengan laki-laki. Sebagai contoh Hadijah, istri Nabi yang pertama adalah seorang pebisnis ulung. Aisyah sebagai panglima perang, dan Shoffa, perempuan yang diangkat oleh Umar sebagai supervisor pasar. Sifat pemalu, merasa terbelakang, dan hanya bersembunyi di rumah bukanlah menggambarkan sebagai seorang muslimah yang kuat.

Dari advokasi yang dilakukan oleh kelompok neomodernis, perempuan di Australia sudah banyak yang berperan di arena publik. Banyak yang berprofesi sebagai guru yang mengajar siswa, baik yang berasal dari muslim maupun nonmuslim. Banyak organisasi perempuan yang didirikan, semisal *Islamic Womans' Welfare Council of Victoria* yang bergerak di bidang sosial dan menangani emigran baru. Ada pula *The Muslim Womans' Network of Australia* yang bergerak di bidang bernegara, memberikan advokasi pendidikan, serta menangani kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Di dalam bidang pernikahan, kelompok modernis berpendapat bahwa orangtua tidak mempunyai hak untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dicintainya, dia berhak untuk menolaknya. Selain itu, yang paling menarik adalah masalah perceraian. Kaum neomodernis selalu berusaha untuk membela hak di bidang perceraian dan mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan hukum positif di Australia. hal ini karena hukum perceraian Islam klasik yang membatasi perempuan dan lebih didominasi oleh kaum laki-laki dianggap kurang relevan dengan eksistensi muslimah di Australia.

3. *Muslimah dan masjid*

Pada kenyataannya, banyak televisi lokal dan juga majalah yang tidak menampilkan berita tentang perempuan yang melaksanakan shalat di masjid. Mereka hanya memberitakan kaum laki-laki, hal ini mengesankan bahwa seakan perempuan tidak boleh melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dalam hal ini, baik kelompok tradisional dan neomodernis mempunyai pandangan yang sama bahwa perempuan boleh saja melaksanakan shalat di masjid.

Namun yang menjadi isu adalah pandangan kelompok liberal yang bahwa posisi atau *shaf* perempuan yang harus di belakang laki-laki dianggap sebagai menomorduakan kaum perempuan. Pandangan ini tidak disepakati oleh kelompok neomodernis yang mengatakan bahwa salah satu kesempurnaan jama'ah adalah berbaris rapat dan berdekatan antarbahu satu dengan bahu lainnya. Pemisahan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan daya konsentrasi mereka dan tidak ada niat untuk menganggang perempuan inferior.

Oleh karena itu, di masjid-masjid Broadmeadows dan Melbourne, perempuan berada di belakang laki-laki. Namun di Doncaster, sebuah daerah suburban Melbourne, pemisah laki-laki dan perempuan adalah dengan menggunakan gordien atau hijab,²⁰ dan di beberapa masjid sudah didesain untuk pemisahan ini.

4. *Pendidikan Perempuan*

Pada umumnya, pendidikan kaum perempuan muslim minoritas tidak bernasib baik, mereka masih dianggap sebagai makhluk yang tidak perlu pendidikan yang tinggi. Namun hal itu sangat bertolak-belakang dengan apa yang terjadi di Australia, pendidikan mereka jauh relatif lebih baik dan lebih diperhatikan.

Persentase pendidikan kaum perempuan yang berpendidikan SMU ke atas justru lebih tinggi dibanding dengan kaum laki-laki. Pendidikan mereka pun bervariasi, dari jurusan bisnis administrasi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Bahkan pada bidang-bidang profesi yang biasanya didominasi laki-laki, perempuan sangat signifikan seperti profesi ilmu alam dan fisika, insinyur, arsitek bangunan, pertanian, dan sebagainya.

Menurut hasil sensus yang dilakukan oleh Biro Statistik Australia tahun 1996 sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel Bidang Pendidikan/Profesi yang Ditekuni²¹

Dari tabel di atas, terlihat bahwa persentase yang paling kecil bagi perempuan adalah pada bidang pendidikan, hal ini disebabkan menurut Saeed karena sensus tersebut tidak memasukkan pendidikan nonformal atau tradisional. Dengan kata lain, di bidang pendidikan-pun persentase perempuan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena yang paling menarik adalah bahwa ternyata perempuan



sangat mendominasi pada bidang insinyur dan pertanian, yang selama ini profesi itu identik dengan pekerjaan laki-laki.

Selain itu, ternyata perempuan-perempuan muslim Australia lebih betah tinggal di sekolah, hal ini berarti mereka menikmati pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki muslim. Namun sensus yang dilakukan pada tahun 1996 sebaliknya menyatakan bahwa keadaan itu berbalik apabila dirata-rata terhadap seluruh remaja di Australia, di mana laki-laki lebih lama mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan.

5. Gerakan Gender di Australia

Di samping gambaran keberhasilan pendidikan perempuan yang menggembirakan di atas, masih banyak isu tentang peran perempuan, apakah mereka harus berpegang teguh pada Islam tradisional dengan meniru kehidupan Islam Arab meskipun mereka hidup di negara Australia ataukah harus disesuaikan dengan sosial budaya yang berlaku selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist.

Untuk melakukan advokasi, didirikanlah beberapa organisasi perempuan bahkan sebagian besar dari organisasi tersebut bersifat multi etnik. Di antara organisasi tersebut adalah:

- a. *Muslim's Woman Association* (Lakemba, Sydney) yang bergerak di bidang pengungsian perempuan dan bagaimana manajemen penanganannya.
- b. *Islamic Woman's welfare Council of Victoria* (Melbourne) yang konsern pada layanan khusus dan program-program peningkatan peran perempuan.
- c. *Islamic Social Service Australia* (Melbourne) yang konsern pada program bantuan untuk anak-anak muslim.
- d. *Islamic Woman's Association of Queensland Inc.* (Brisbane) yang konsern pada layanan terhadap orang lanjut usia dan membantu perempuan dan anak-anak yang membutuhkan.
- e. *Islamic woman's Association Support* (Perth) dan *Muslim Woman's Association of South Australia* (Adelaide) yang keduanya bergerak dalam bidang seminar, lobi pemerintah, anti diskriminasi, pendidikan perempuan dan anak-anak.
- f. *Muslim Woman's national Network of Australia Inc.* (Sydney). Organisasi ini yang dianggap paling berpengaruh dan beranggotakan lebih dari 2000 orang serta merupakan representasi dari seluruh negara bagian dan wilayah di Australia. Organisasi ini mempunyai jaringan dengan organisasi muslim di seluruh negara. Di antara programnya adalah; (1) meningkatkan dan menaikkan image perempuan baik dikalangan muslim maupun di luar, (2) meningkatkan kesadaran perempuan terhadap isu-isu yang relevan dan penting, (3) mengadakan lobi terhadap keadilan dan pemberdayaan perempuan di masyarakat utamanya dalam pekerjaan, (4) mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuknya, dan (5) menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan lainnya untuk selalu *sharing* ide dan tukar pendapat.

Dengan lahirnya berbagai organisasi perempuan tersebut, diskusi kelompok di antara perempuan semakin intensif. Untuk masalah personal, agama, kewanitaan, pernikahan, masalah jilbab, kenakalan remaja dan konsultasi keluarga dengan disediakanya fasilitas *Cyberspace* yang bersifat anonim (rahasia).

Last but not least, perempuan Australia pada umumnya tidak mengalami diskriminasi di kalangan muslim minoritas, namun diskriminasi itu terkadang masih dirasakan datang dari masyarakat pada umumnya, dan ini pun karena sangat dipengaruhi oleh keadaan kaum muslimin di luar Australia. Sebagai contoh ketika terjadi pengeboman di Bali dan WTC di Amerika, sikap masyarakat Australia agak menaruh *prejudice* kepada perempuan-perempuan yang berjilbab.

F. PENUTUP



Salah satu kunci keberhasilan mengapa kaum muslim minoritas di suatu negara dapat bekerjasama secara optimal dengan kaum mayoritas adalah karena mereka di negeri orang bukan sebagai bagian asing dari negara tersebut meskipun negara itu dipimpin oleh seorang yang nonmuslim. Oleh karena itu, pemaknaan *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* tidak berlaku lagi, meskipun mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif. Metode hijrah internal adalah metode yang paling bagus dengan sambil membangun *social trust* bahwa Islam tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum mayoritas.

Faktor lain adalah dengan selalu melakukan reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran klasik dan selanjutnya disesuaikan dengan situasi sosial dan budaya yang ada sehingga hilang akan kesan bahwa Islam adalah agama yang anti kemajuan, anti demokrasi, statis, dan sangar (adanya hukum potong tangan).

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran bahwa kaum minoritas adalah bagai tamu di negeri orang sehingga apabila ada keinginan harus didialogkan dan dikomunikasikan dengan tuan rumah sehingga akan tercipta keserasian. Mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai muslim secara optimal tanpa harus bertabrakan dengan pemerintah atau bahkan membentuk negara bagian muslim sendiri.

Nasib perempuan di Australia, baik pada bidang pendidikan maupun profesi ternyata lebih baik apabila dibandingkan dengan laki-laki, bahkan pada pos-pos tertentu yang selama ini diidentikkan dengan profesi laki-laki seperti insinyur dan arsitek. Keberhasilan ini tentu saja dipengaruhi oleh dua hal penting yaitu terbukanya wawasan di kalangan kaum muslim sendiri dan adanya jaminan pemerintah yang konsisten sebagai negara demokrasi.

ENDNOTE

¹ Khalid Abu El Fadl, *Islam Tantangan Demokrasi*, Terj, (Jakarta, Ufuk Press, 2004), hal. 165.

² *Ibid*, hal 166.

³ Gilles Kepel, *Allah in the West: Islamic Movements in Amerika and Europe* (Opolity Press, Cambrige & Blackwell Publisher Ltd, Oxford, 1997), hal. 136.

⁴ Azyumardi Azra, dalam M. Ali Kettani, terj. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. xxii.

⁵ M. Ali Kettani, *Ibid*, hal. xxv.

⁶ Yvonne Yazbeck Haddad (Ed.), *Muslim in the West: From Sojourners to Citizen* (Oxford University Press, 2002), hal. i.

⁷ Hubungan dengan Islamophobia ini, Runnymede melakukan survey pandangan miring masyarakat Inggris terhadap Islam, hasilnya ada asumsi bahwa Islam adalah agama monolitik dan statis, tidak bisa menyesuaikan dengan budaya Barat (inferior), sangar, agresif, anti demokrasi, berpihak pada aksi teror dan tampil sebagai musuh. Lihat Yvonne Yazbeck Haddad, *Islam*, *Ibid*, hal. 24.

⁸ Sebelumnya telah didirikan UKCIA (United Kingdom Action Committee on Islamic Affair) yang anggotanya terdiri atas kaum intelektual moderat yang mengupayakan hak-hak minoritas. Kemudian CRE (Commision for Racial Equaty)



yang bergerak mencari bukti-bukti perlakuan diskriminatif dan stereotip terhadap minoritas muslim.

⁹ Pada tahun 2001, anggota DPR yang muslim di seluruh Inggris berjumlah 150 orang.

¹⁰ Hal ini bisa berhasil berkat dorongan Yusuf Islam, seorang penyanyi pop yang bernama asli Cat Seven.

¹¹ *Recognition* atau pengakuan terhadap minoritas setelah melalui perjuangan panjang meliputi kebebasan untuk berorganisasi, melakukan ibadah, kebebasan untuk memilih sekolah, dapat mengakses sumber perkumpulan masyarakat, pusat-pusat budaya dan ibadah, dapat mengakses mekanisme pemilihan langsung, pemberdayaan individu dan kelompok yang agak berseberangan dengan kebijakan pemerintah, keterwakilan di forum pemerintah, dan kebebasan memilih politisi. Lihat Yvonne, *Ibid...*, hal. 33.

¹² Abdullah Saeed, *Islam in Australia* (Sydney: National Library of Australia, 2003), hal. 65.

¹³ Fenomena baru yang sangat menarik adalah penolakan masyarakat Australia, termasuk minoritas muslim, terhadap pelaksanaan hukuman mati *The Smiling Bombers*, Amrozi cs, meskipun sebagian besar korban bom Bali adalah warga Australia.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Islam*, hal. 207.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 169.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 160. Adapun menurut Dona Geberke-White, *The Face Behind the Veil*, terj. Bandung, MQ Press, 2007, hal. 2, perempuan muslimah di Amerika secara garis besar terbagi menjadi lima. Pertama adalah kelompok tradisional. Memakai jilbab bagi mereka adalah eksistensi mereka. Kedua, kelompok pembaur (*blender*). Bagi kelompok ini, kerudung (jilbab) bukanlah sebagai identitas, karena menjadi muslimah tidak harus berjilbab. Ketiga adalah kelompok muallaf, yakni wanita kulit putih yang tertarik untuk memeluk agama Islam dan senang memakai gaun dan kerudung. Hal ini menampik pandangan bahwa perempuan muslim identik dengan kaum emigran. Keempat adalah kelompok tertindas (*persecuted*), yakni emigran perempuan yang masuk ke Amerika karena mereka mengalami penindasan di negaranya. Nasib mereka sangat mengenaskan karena mereka bertempat di barak-barak pengungsian yang kumuh. Kelima adalah kelompok pengubah (*changer*), mereka berkecimpung dalam kegiatan sosial dan mengadakan advokasi terhadap perempuan yang mengalami penindasan. Sebagai contoh adalah Zakia Mahasa yang getol dalam wilayah ini, dan akhirnya terpilih sebagai Kepala Urusan Masalah Keluarga di Pengadilan Keliling Baltimore City dan juga sebagai ketua Mercy Amerika, sebuah lembaga amal muslim yang bermarkas di Michigan.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Islam*, hal. 166-180.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 168.



¹⁹ Pandangan yang seperti ini lebih parah lagi dialami oleh perempuan minoritas di Norwegia, mereka harus melakukan genital mutilation (Jawa: sepiŕ) dan kawin paksa. Perempuan meninggal karena sepiŕ ini sudah banyak terjadi, sebagaimana dilaporkan oleh Centre for Woman and Gender Research di Universitas Oslo (<http://islamineurope.blogspot.com/2007/03/Norway-minority-woman-last-out-at.html>, diunduh 15 Desember 2008).

²⁰ Abdullah Saeed, *Islam*, hal. 175. Pemisahan menggunakan hijab dengan baris yang sejajar (tidak depan belakang) sudah lazim di masjid-masjid di tanah air.

²¹ *Ibid.*, hal. 179.

DAFTAR BACAAN

- Azra, Azyumardi. 2005. Dalam M. Ali Kettani, terj, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- El Fadl, Khaled Abu. 2004. *Islam Tantangan Demokrasi*, terj, Jakarta: Ufuk Press.
- Geberke-White, Donna. 2007. *The Face Behind the Veil* terj. Bandung: MQ Press.
- Haddad, Yvonne Yazbeck (Ed.). 2002. *Muslim in the West: From Sojourners to Citizen*. Oxford: Oxford University Press.
- <http://islamineurope.blogspot.com/2007/03/Norway-minority-woman-last-out-at.html>, diunduh 15 Desember 2008.
- Kepel, Gilles. 1997. *Allah in the West: Islamic Movements in Amerika and Europe*. Cambridge: Polity Press & Oxford: Blackwell Publisher Ltd.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Islam in Australia*. National Library of Australia, Sydney.